



RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN

Tahun 2024 - 2026

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

Jln. Raya Solo No 32 Jiwan

Madiun 63161

Telp: 0351- 462728 Fax: 0351-492759

Email : dinkeskabmadiun@gmail.com

Website : dinkes.madiunkab.go.id



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pada umumnya, pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan public selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005–2025. Kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra

Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat daerah berubah mendasar dan menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun tahun 2024 sampai dengan 2026. Penyusunan perencanaan secara legal formal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Bagi jabatan kepala daerah yang berakhir di tahun 2023 maka penyusunan rencana daerah mengacu pada Instruksi Mendagri yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat, dan isu strategis aktual. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten Tahun 2024-2026 serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Perubahan RPD dapat dilakukan jika Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan serta Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) *Permenkes* No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada *Standar Pelayanan Minimal* Bidang Kesehatan
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- 7) Instruksi Mendagri Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024
- 9) Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun
- 10) Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Madiun
- 11) Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023-2024
tanggal 24 Maret 2023

12) Peraturan Bupati Madiun Nomor 77 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun

1.3. Maksud dan Tujuan

Ada pergeseran tata kelola pemerintahan mengantisipasi masa transisi dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru (DOB). Maka pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Intruksi Mendagri 52/2022 pada intinya menghadapi masa transisi bertujuan menyiapkan Dokumen Pembangunan Daerah baik propinsi maupun kabupaten dan kota tahun 2024-2026 dimana nantinya akan digunakan oleh Penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman unuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sekaligus mengantisipasi kekosongan hukum karena daerah dipimpin Pj dan sambil menunggu kepala daerah definitif hasil pemilu, menjelang Pilkada serentak tahun 2024 nantinya, dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah menjadi panduan bagi penjabat KDH dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di masa transisi yang akan diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Kepala Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perangkat Daerah meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan



1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

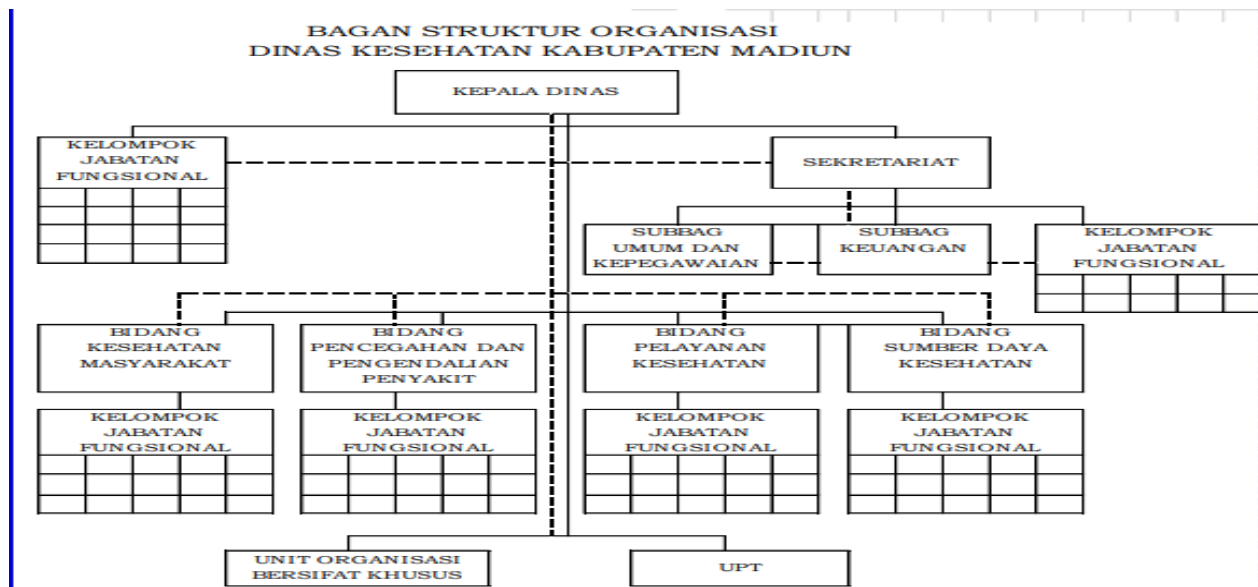
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Mendasar Peraturan Bupati Madiun Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun maka Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Sub Bagian Keuangan; dan
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- h. (UPT); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :



A. Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan.;
- b. kebijakan daerah di bidang kesehatan.;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan.;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan.;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang kesehatan.;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan fungsi struktur di Dinas Kesehatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan Sekretaris, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; -
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset dan barang milik Negara/daerah;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, aset dan barang milik Negara/daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan; dan –
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional serta monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat
- b. perumusan kebijakan teknis kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi program kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang/program kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- e. penyiapan pengelolaan dan pembinaan upaya kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi serta penanggulangan kejadian luar biasa, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pembinaan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZA serta penanggulangan kejadian luar biasa;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pelayanan kesehatan primer dan Rujukan tingkat Daerah Kabupaten termasuk peningkatan mutu dan akreditasinya serta pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan gawat darurat, penanggulangan bencana bidang kesehatan, jaminan kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pelayanan kesehatan primer dan Rujukan tingkat Daerah Kabupaten termasuk peningkatan mutu dan akreditasinya serta pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan

- penunjang, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan gawat darurat, penanggulangan bencana bidang kesehatan, jaminan kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pelayanan kesehatan primer dan Rujukan tingkat Daerah Kabupaten termasuk peningkatan mutu dan akreditasinya serta pelayanan kesehatan tradisional, kecelakaan lalu-lintas, jaminan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pembinaan di bidang pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pelayanan kesehatan primer dan Rujukan tingkat Daerah Kabupaten termasuk peningkatan mutu dan akreditasinya serta pelayanan kesehatan tradisional, kecelakaan lalulintas, jaminan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya;

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional serta monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang/program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT, pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang/program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT, pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten; -

- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi di bidang/program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT, pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten;
- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang/program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT, pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerbitan rekomendasi ijin praktek kesehatan, rekomendasi ijin kerja tenaga kesehatan, rekomendasi pendaftaran pengobatan tradisional dan rekomendasi ijin pengobatan tradisional;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka Penerbitan rekomendasi ijin RS kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka Penerbitan rekomendasi ijin sarana kesehatan yang meliputi : rekomendasi ijin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, klinik puskesmas, optikal dan laboratorium;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka Penerbitan rekomendasi ijin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
- j. pelaksanaan koordinasi dalam rangka menyiapkan bahan rekomendasi Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) perusahaan rumah tangga;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerbitan rekomendasi izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
- l. melaksanakan pengawasan post-market produk makanan – minuman industri rumah tangga;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Organisasi Bersifat Khusus merupakan unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Unit Organisasi Bersifat Khusus mempunyai fungsi mengelola keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian secara otonom. Unit Organisasi Bersifat Khusus dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2022 berdasarkan komposisi jabatan fungsional di lingkup UPT dan Rumah sakit adalah sebagai berikut (data tersebut belum termasuk tenaga administrasi atau fungsional umum yang bekerja di Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta Rumah Sakit:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada Tahun 2022

No	Jenis Jabatan	Dinas Kesehatan	Puskesmas	RSUD Caruban	RSUD Dolopo	RS Dungus
1	Struktural	19		13	13	4
2	Dukungan Manajemen		60	39	39	33
3	Dokter		51	11	22	8
4	Dokter Spesialis			26	21	8
5	Drg Spesialis			1		
6	Dokter Gigi		28	2	4	1
7	Apoteker		23	8	4	4
8	Tenaga Tehnis Kefarmasian		29	11	6	7
9	Ketehnisian Medis		25	11	6	7
10	Elektromedis	2		5	2	2
11	Keterapian Fisik		11	4	4	6
12	Tehnik Biomedik Lainnya	2		12	9	7
13	Ahli Tehnik Laboratorium Medik		29	12	12	8
14	Kesling	2	25		1	3
15	Gizi	3	31	5	4	4

16	Kesmas	12	22		1	
17	Bidan	1	339	36	36	8
18	Perawat	4	308	246	112	81
	Jumlah	45	981	442	296	191

Sumber: Data SDM Kes Tahun 2022

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun

Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik untuk Dinas Kesehatan maupun UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun yaitu puskesmas dan Gudang Farmasi. Sarana dan prasarana tersebut berupa gedung pelayanan dan kendaraan operasional.

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada Tahun 2021

No.	Sarana	Jumlah
1.	Puskesmas Perawatan	10
2.	Puskesmas Non Perawatan	16
3.	Puskesmas Pembantu	58
4.	Polindes	85
5.	Ponkesdes	40
6.	Posyandu	880
7.	Puskesmas Keliling	28
8.	Ambulance	38
9.	UPT Gudang Farmasi	1

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kesehatan						0.78	0.8	0.8		0.79	0.79	0.79	0.8	#DIV/0!	0	98.73	101.27	100.00
2	Index Keluarga Sehat					0.19	0.195	0.2	0.205			0.201	0.206	0.218	#DIV/0!	#DIV/0!	97.01	97.09	94.04
3	Persentase Keluarga Sehat					18.4	18.9	19.4	19.9		19.07	14.52	20.14	21.77	#DIV/0!	96.49	130.17	96.33	91.41
4	Umur Harapan Hidup							71.54	71.7		71.22	71.38	71.5	71.9	#DIV/0!	0	0	100.06	99.72
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							80.01	83						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Persentase ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan bagi ASN dan Non ASN yang diangkat Pemerintah Kabupaten Madiun di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

8	Persentase ketersediaan dana untuk kebutuhan komponen instalasi listrik, Peralatan kebutuhan kantor, penyediaan barang cetakan dan penyelenggaraa n rapat dan konsultasi SKPD yang terpenuhi																#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	Persentase pemenuhan anggaran untuk jasa penunjang urusan pemerintah daerah																	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Persentase ketersediaan anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk dinas kesehatan																	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Angka Kematian Ibu																	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Angka Kematian Bayi																	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Prevalensi Balita Stunting																	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



14	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM Bidang Kesehatan														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Persentase ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan,														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



21	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Prosentase tenaga kesehatan yang mendapatkan izin praktek														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Prosentase sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan praktek tenaga kesehatan														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Prosentase tenaga kesehatan Non ASN yang mendapatkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Prosentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



27	Prosentase tenaga kesehatan yang penilaian angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standar													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Prosentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Prosentase Produsen PKRT yang Berijin sesuai PERMENKES													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31	Jumlah Produsen PKRT yang Berijin sesuai PERMENKES													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Persentase Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



	yang diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (%)																		
33	Presentase Sampel makanan Industri Rumah Tangga Pangan yang diuji laboratorium yang memenuhi syarat													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
35	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Persentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan sesuai perencanaan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
37	Persentase Poskestren yang dilakukan pendampingan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



Tabel TC 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Madiun

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																				
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																				
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota																				
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																				



Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																			
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																			
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																			



Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Program-program yang tersaji pada dinas kesehatan merupakan program prioritas daerah yang tersaji dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program untuk masing-masing program prioritas ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan daerah. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan – kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun khususnya di bidang kesehatan.

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun adalah masyarakat dan perangkat daerah yang berkolaborasi dalam penanganan masalah kesehatan, Kelompok sasaran perangkat daerah yang dimaksudkan adalah semua sector yang mendukung tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indicator indeks pembangunan manusia yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas PPKB, P3A
3. Dinas DUKCAPIL
4. Dinas PARPORA
5. Dinas PMD
6. BPKAD
7. BAPPEDA

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KESEHATAN

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun layaknya instansi atau satuan kerja perangkat daerah lainnya juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang diharapkan atau tidak diharapkan tetap harus dihadapi. Berdasarkan pada capaian/ kondisi saat ini, terdapat permasalahan kesehatan sebagaimana sebagai berikut :

1. Angka kematian ibu sejumlah 6 kasus dari 100.000 Kelahiran hidup (77,19 per 100.000 Kelahiran Hidup) dan angka kematian bayi sejumlah 48 dari 1000 Kelahiran Hidup (6,18 per 1000 Kelahiran Hidup) di tahun 2022.
2. Prevalensi stunting 13,3 % Desember 2022 dari target Nasional 14 % di Tahun 2024 dan 9,5 % dari target Propinsi Jawa Timur.
3. Belum mencapai target 100 % 7 SPM (Standart Pelayanan Minimal) dari bidang kesehatan di Bidang kesehatan masyarakat yaitu :
 - Pelayanan Bumil 88,67 %
 - Pelayanan Kesehatan Balita 88,48 %
 - Skrining Kesehatan Usia Produktif 86,89 %
 - Pelayanan Kesehatan Lansia 91,15 %
 - Pelayanan ibu bersalin 87,90 %,
 - Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 92,84
4. Skrining pada usia pendidikan dasar 91,55 %
5. Peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan. Cakupan sanitasi aman tahun 2022 mencapai 8,3% (target nasional 15% tahun 2024),
6. Cakupan pengawasan kualitas air minum sesuai standar tahun 2022 mencapai 74% (target nasional 76% tahun 2024), sehingga masih perlu upaya untuk mencapai target sesuai target nasional.
7. Peningkatan cakupan desa STBM 5 pilar. sesuai Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pilar I : Stop BABS Kabupaten Madiun telah berhasil mencapai Kabupaten ODF / terbebas dari perilaku BABS pada tahun 2021, pilar II: Cuci tangan pakai sabun, pilar III: Pengelolaan air minum dan makanan, pilar IV: Pengelolaan sampah rumah tangga, pilar V: Pengelolaan limbah cair

rumah tangga, capaian desa 5 pilar stbm tahun 2022 masih kurang dari 1% sedang target cakupan desa stbm 5 pilar nasional 10% (tahun 2024), sehingga perlu upaya untuk mencapai target cakupan desa 5 pilar STBM.

8. Peningkatan cakupan TPP yang bersertifikat laik hygiene sanitasi dan berstiker pembinaan yang baru mencapai 6,1%, meskipun capaian TPP laik sehat sudah mencapai 68,35% dari target nasional 50%.
9. Pelaksanaan program Kabupaten Kota Sehat untuk memperoleh penghargaan swasti saba. Karena tahun 2021 kabupaten madiun tidak mengirim dokumen, sedang tahun 2023 tidak lolos verifikasi dokumen.
10. Klinik Utama/Pratama, UPT khusus (PMI) belum terakreditasi
11. Public Savety Center (PSC) 119 Kabupaten Madiun belum beroperasi, tahun 2022 ini proses penyiapan Sarana dan Prasarana meliputi bangunan gedung dan peralatan, masih perlu menyiapkan payung hukum PSC, Sumber Daya Manusia/ketenagaan yang spesifik (Medis dan Paramedis) untuk PSC.
12. Belum tercapainya target Universal Health Coverage (UHC) untuk Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 sebesar 95%, Kabupaten Madiun saat ini baru mencapai 76,6%, hal ini perlunya dukungan dan koordinasi intensif antara stakeholder terkait melalui Forum Konsultasi Pencapaian UHC yang melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, BPJS Kesehatan serta lintas sector terkait lainnya.
13. Sebanyak 73% puskesmas yang masih belum memenuhi standar ketenagaan minimal 9 jenis tenaga Kesehatan wajib ada berdasarkan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, sebanyak 48,5% kebutuhan tenaga perawat di RS Caruban belum terpenuhi, sebanyak 25,7% kebutuhan tenaga perawat di RS Dolopo belum terpenuhi.
14. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM tenaga kesehatan yang berkompeten. (73 % puskesmas yang masih belum memenuhi standard jenis tenaga kesehatan dari 9 jenis tenaga kesehatan sebagaimana Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas). sebanyak 48,5% kebutuhan tenaga perawat di RS Caruban belum terpenuhi, sebanyak 25,7% kebutuhan tenaga perawat di RS Dolopo belum terpenuhi.
15. Sarana dan prasarana di Rumah Sakit Daerah dan di Puskesmas masih ada yang belum memadai dengan gambaran sebagai berikut:
 - a. Pencapaian ASPAK belum mencapai target 70% pada 2 RS Daerah dan 22 Puskesmas

- b. Kebutuhan obat dan BHP di RS Daerah dan Puskesmas yang diadakan tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan disebabkan keterbatasan anggaran dan perubahan harga yang fluktuatif.
- 16. Peredaran obat dan pangan olahan yang beredar di masyarakat cukup banyak yg belum memenuhi standard. Dari pemeriksaan sampel produk makanan yang diperiksa terdapat 22,8 % yang Tidak Memenuhi Syarat.
- 17. Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi kurang dari target
- 18. Capaian Desa UCI dari target 100% tercapai 90, 78%
- 19. Capaian Suspect TB yang masih rendah yaitu 5.263 (77,54%) dari 7.714 (100%)

3.2. Isu Strategis

Berdasarkan Permasalahan yang ada ditetapkan isu stratejik sebagai berikut:

1. Gambaran kondisi status kesehatan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dari Usia harapan hidup waktu lahir (UHH), banyaknya kematian ibu maternal (AKI), banyaknya kematian bayi (AKB) serta Indeks Keluarga Sehat(IKS)
2. Penurunan angka prevalensi stunting 9,5 % Tahun 2024 Propinsi Jawa Timur. Prevalensi Stunting Kabupaten adiun 13,13 Desember 2022. Prevalensi stunting di Indonesia masih 27,67 persen. Angka prevalensi stunting tersebut masih di atas ambang batas standar WHO yaitu 20%. Padahal, pemerintah telah menetapkan target penurunan angka stunting pada tahun 2024 mencapai 14%
3. Cakupan sanitasi aman tahun 2022 mencapai 8,3% (target nasional 15% tahun 2024);
4. Cakupan pengawasan kualitas air minum sesuai standar tahun 2022 mencapai 74% (target nasional 76% tahun 2024)
5. Jumlah TPP yang bersertifikat laik hygiene sanitasi dan berstiker pembinaan baru mencapai 6,1%, meskipun capaian TPP laik sehat sudah mencapai 68,35% dari target nasional 50%.
6. Kabupaten Madiun tahun 2023 tidak lolos verifikasi untuk mendapatkan penghargaan swasti saba program Kabupaten kota sehat.
7. Belum semua Faskes terakreditasi
8. Belum ada UPT yang khusus menangani system penanggulangan gawat darurat terpadu
9. Belum tercapai UHC di Kabupaten Madiun

10. Belum tercapainya sumber daya manusia puskesmas yang sesuai standart
11. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan melalui pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan, peningkatan sarana prasarana dan peralatan Kesehatan termasuk pemenuhan obat, bahan habis pakai dan pemenuhan peredaran obat dan pangan olahan yang aman
12. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia Kesehatan melalui perencanaan , pengadaan tenaga Kesehatan dan peningkatan kompetensi.
13. Penyakit Hipertensi menurunkan kualitas kesehatan masyarakat dikarenakan risiko terjadinya komplikasi jika tidak ditangani secara komprehensif dan pengobatan teratur
14. Penyakit PD31 masih terjadi dan memungkinkan terjadinya KLB
15. Perlu dilakukan screening masal di tingkat desa pada masyarakat sekitar penderita positif TBC

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka merealisasikan tugas pokok Dinas Kesehatan untuk mengatur fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Madiun, maka diperlukan rumusan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2024-2026 yang lebih jelas yaitu menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya dukungan terhadap perwujudan capaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Madiun.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun adalah: **“Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar”** dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan”** dengan didukung tatakelola keuangan dan tata kelola kinerja yang baik. Secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026 (TC 25)

No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TUJUAN DAERAH								
	Menurunkan Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai		73,58 **	74,18 **	74,78 **	74,78 **	
			nilai		74,19 *(moderat)	74,68 *(moderat)	74,93 *(moderat)	74,93 *(moderat)	
2	SASARAN DAERAH 2								
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	nilai		0,805 **	0,808 **	0,812 **	0,812 **	
3	TUJUAN OPD (DINAS KESEHATAN)								
	Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	nilai		0,805 **	0,808 **	0,812 **	0,812 **	
4	SASARAN OPD (DINAS KESEHATAN)								Dinkes dan RS
	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	nilai	0,218	0,22	0,22	0,22	0,22	Dinkes dan RS
		IKM Kesehatan	nilai	71	71,54	71,7	71,86	71,86	Dinkes dan RS
		Angka Harapan Hidup	nilai	71,90	72	72	72	72	Dinkes dan RS
5	PROGRAM PENUNJANG								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	70,04	80,01	83,00	86,00	86,00	Dinkes dan RS
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	nilai	75	77	88	90	90	Dinkes dan RS
		Nilai Pengawasan Kearsipan	nilai	40,94	60,94	66,34	71,74	44	Dinkes dan RS



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK)	Persen	100%	100%				Dinkes dan RS
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	1333	1429	1528	1640	1071	Dinkes dan RS
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	12	12	12	Dinkes
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terdantai	persen	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	2	2	2	2	Dinkes
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1	1	1	Dinkes
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	4	4	4	4	Dinkes
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4	4	4	4	Dinkes
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket	4	4	4	4	4	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdanei	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinkes
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	paket	1	1	1	1	1	Dinkes
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12	Dinkes
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	4	4	Dinkes
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinkes
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	17	20	20	20	20	Dinkes
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	2	2	2	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	6	6	6	6	Dinkes
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Akreditasi Rumah Sakit (Rumah Sakit Caruban)	Terakreditasi	Terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	RS Caruban
		Akreditasi Rumah Sakit (Rumah Sakit Dolopo)	Terakreditasi	Terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	RS Dolopo
6		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sesuai standar (RSUD Caruban)	Persen	90%	90 %	91 %	92 %	92 %	RS Caruban
		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sesuai standar (RSUD Dolopo)	Persen	92.22%	94.44 %	95.56 %	96.67 %	96.67 %	RS Dolopo
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	Rumah Sakit Caruban dan Dolopo
6	PROGRAM PRIORITAS								
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	per 1000 lahir hidup	6,18 per 1000 lahir hidup	5,57 per 1000 lahir hidup	5,29 per 1000 lahir hidup	5,02 per 1000 lahir hidup	5,02 per 1000 lahir hidup	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Angka Kematian Ibu	per 100.000 lahir hidup	77,19 per 100.000 lahir hidup	73,00 per 100.000 lahir hidup	70,00 per 100.000 lahir hidup	66,00 per 100.000 lahir hidup	66,00 per 100.000 lahir hidup	Dinkes
		Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada puskesmas (9 tenaga kesehatan)	Persen	76,92 %	84,00 %	92,00 %	100%	10%	Dinkes
		Prevalensi Balita Stunting	Persen	17,6%	14%	12%	10%	69.00%	Dinkes
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	Persen	57%	61,00 persen	65,00%	69,00%	2.00%	Dinkes
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Caruban)	Persen	65.17 %	66 %	67 %	68 %	68 %	RS Caruban



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Dolopo)	Persen	64%	65%	66%	67%	67%	RS Dolopo
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinkes
		persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit (rsud caruban)	%	100.00%	100 %	100 %	100 %	100.00%	Rumah Sakit Caruban
		persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit (rsud dolopo)	%	100.00%	100 %	100 %	100 %	100.00%	Rumah Sakit Dolopo
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	unit	1	1	1	1	3	Dinkes
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1	1	1	1	3	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit Kerja	2 Unit	2 Unit	2 unit	2 unit	6 unit	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 unit	6 unit	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5 unit	3 Unit	4 Unit	3 Unit	10 Unit	Rumah Sakit Dolopo dan Caruban
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	3	5	5	5	15 Unit	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	2	2	2	2	6 unit	Dinkes
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	1	1	1	3 Unit	Dinkes
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	1	1	1	1	3 Unit	Dinkes
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	15	6	6	4	16	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	146	95	86	60	241	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	103	122	127	132	381	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Caruban
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	30	32	32	32	96	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Caruban



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	312	234	230	230	694	Dinkes
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit alat	100	100	100	100	300	Dinkes
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	persen	81.7	100%	100%	100%	100%	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	Orang	8,197	8,971	8,881	8,797	26,649	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7,682	8,563	8,569	8,488	25,620	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7,730	8,156	8,075	7,999	24,230	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30,458	41,926	41,408	40,994	124,328	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	73,626	74,400	75,000	75,245	224,645	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	366,309	421,574	421,574	421,574	1,264,722	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	102,406	102,406	102,406	102,406	307,218	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	59,249	239,829	239,829	239,829	719,487	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17,296	17,381	17,381	17,381	52,143	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	980	1,308	1,310	1,312	3,930	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terduga Tuberkolosis sesuai Standar	Orang	5,977	6,575	7,232	7,250	21,057	Dinkes
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	913	1,005	1,106	1,216	3,327	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9090	9,090	9,090	9,090	27,270	Dinkes
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	220	220	220	220	660	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kegiatan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	21 Dokumen	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6 dokumen	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6 dokumen	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	15 dokumen	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6 dokumen	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	Dinkes
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	39 Dokumen	Dinkes
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		4	4	4	12	Dinkes
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	12	12	12	12	12	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kegiatan	1	1	1	1	3	Dinkes
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12	12	12	12	36	Dinkes
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	48	48	48	48	144	Dinkes
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Potensial KLB ke Lboratorium Rujukan/Nasional	Paket	34	34	34	34	102	Dinkes
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	unit	7	10	10	10	30	Dinkes
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pusk	26	26	26	26	78	Dinkes
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diterbitkan ijinnya	persen	100	100	100	100	100	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Pusk	26	26	26	26	78	Dinkes
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	24 Dokumen	Dinkes
									Dinkes
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan (Medis) terhadap jumlah penduduk	nilai	0.31 : 1.000	0.5 : 1.000	0.7 : 1.000	0.9 : 1.000	01:01.0	Dinkes
		Rasio tenaga kesehatan (paramedis) terhadap jumlah penduduk	nilai	1.4 : 1.000	02:01.0	2.5 : 1.000	03:01.0	03:01.0	Dinkes
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pengajuan Rekomendasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang dikeluarkan	persen	100	100	100	100	100	Dinkes
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	90	90	90	90	270	Dinkes
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memenuhi standar SDM sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	persen	76.9	85	92	100	100	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	6	6	6	6	18	Dinkes
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah perawat ponkesdes dan dokter puskesmas rawat inap standar yang mendapat honor dari Provinsi	Org	40	40	40	40	120	Dinkes
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	4	4	4	4	12	Dinkes
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nakes yang lulus uji kompetensi kenaikan jenjang	persen	95	100	100	100	100	Dinkes
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	90	90	90	90	270	Dinkes
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi , alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standard	%	100	100	100	100	100	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diperiksa	Persen	73	73	74	75	75	Dinkes
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	73	72	73	74	219	Dinkes
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi komitmen dalam kurun waktu 3- 6 bulan setelah nomor PIRT diterbitkan	%	78%	78	80	81	81	Dinkes
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	360	260	273	286	819	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase TPM Jasa Boga, Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memperoleh sertifikat laik higiene sanitasi	%	10	12	12.5	13	13	Dinkes
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat, Jumlah DAM yang memenuhi syarat	Dokumen	2	2	2	2	6	Dinkes
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Prosentase Tempat pengolahan pangan siap saji yang mendapat stiker pembinaan	%	4.5	5	6	7.5	7.5	Dinkes
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah tempat pengelolaan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan stiker pembinaan	Dokumen	1	1	1	1	3	Dinkes
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	65	65	70	75	210	Dinkes



No	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024	2025	2026	Kondisi akhir periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	152	152	152	152	456	Dinkes
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentasi UKBM yang di lakukan pembinaan	%	100	100	100	100	100	Dinkes
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten	persen	100	100	100	100	100	Dinkes
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	3	3	3	9	Dinkes
	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota	Prosentasi UKBM yang dibina	persentase	100	100	100	100	100	Dinkes
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil bimbingan tehnis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	3	3	3	9	Dinkes



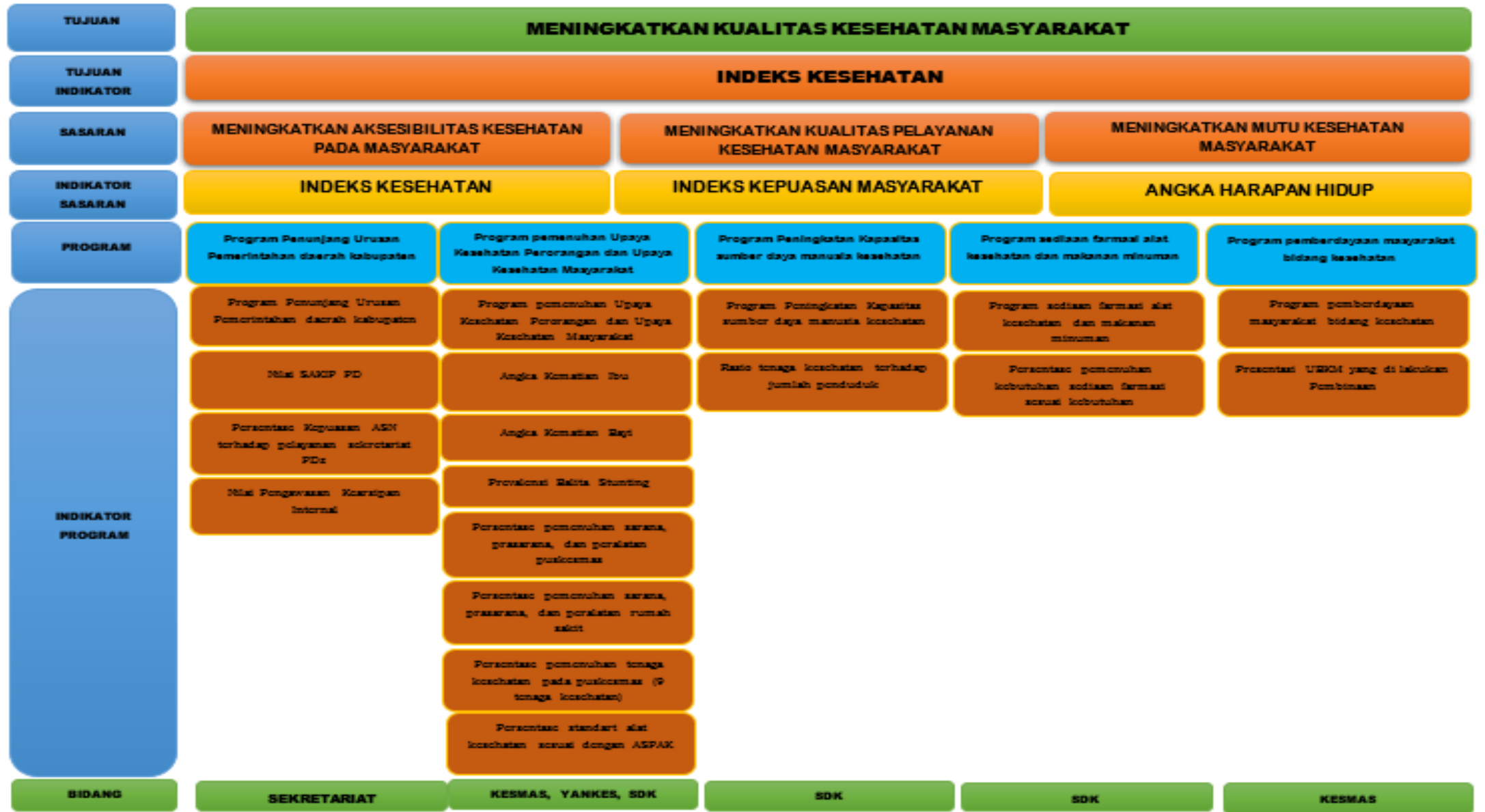
Keluarga Sehat adalah keluarga **yang memenuhi IKS (Indeks Keluarga Sehat) $\geq 0,800$** dari jumlah keluarga yang ada.

Adapun 12 Indikator keluarga sehat adalah :

1. Keluarga mengikuti program KB (keluarga berencana)
2. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar
3. Bayi mendapatkan Imunisasi lengkap
4. Pemberian ASI eksklusif bayi 0 sd 6 bulan
5. Pemantuan pertumbuhan balita
6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar
7. Penderita hipertensi yang berobat teratur
8. Penderita gangguan jiwa berat yang diobati
9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10. Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN
11. Mempunyai sarana air bersih
12. Menggunakan jamban keluarga



4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah



PROGRAM	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Indikator Program	Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Bayi	Prevalensi Balita Stunting	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada puskesmas (9 tenaga kesehatan)	Persentase standar alat kesehatan sesuai dengan ASPAK
KEGIATAN	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
INDIKATOR KEGIATAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN DANA UNTUK PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH						
Gub Kegiatan	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Gub Kegiatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
SEKSI	YANKES PRIMER	SDMK	ALKES	ALKES	FARMAKMIN	FARMAKMIN	ALKES





BAB V

TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Strategi dan Kebijakan. Program prioritas Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan mengacu pada tujuan pembangunan daerah yaitu **“Menurunkan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat”** dan **“Meningkatkan daya saing sumber daya manusia”**.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah maka sasaran yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan Menurunnya beban pengeluaran masyarakat dengan strategi Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ketenagakerjaan melalui strategi pengoptimalan akses dan mutu Sumber Daya Manusia yang kolaboratif yang berfokus pada pemerataan mutu fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaminan kemudahan akses pada layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keahlian, penguatan dukungan lingkungan masyarakat dalam mendukung kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta peningkatan mutu pelatihan pengembangan keahlian ketenagakerjaan

Arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan mengacu pada tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Jaminan Kesehatan
- b. Kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penguatan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat
- c. Pengoptimalan kapasitas fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan dalam memaksimalkan daya tampung dan pelayanan

- d. Pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang kompeten pada seluruh faskes dan fasilitas Pendidikan
- e. Peningkatan kecukupan sarana-prasarana serta media yang tepat guna penunjang peningkatan mutu pendidikan dan Kesehatan
- f. Program Wajib Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat



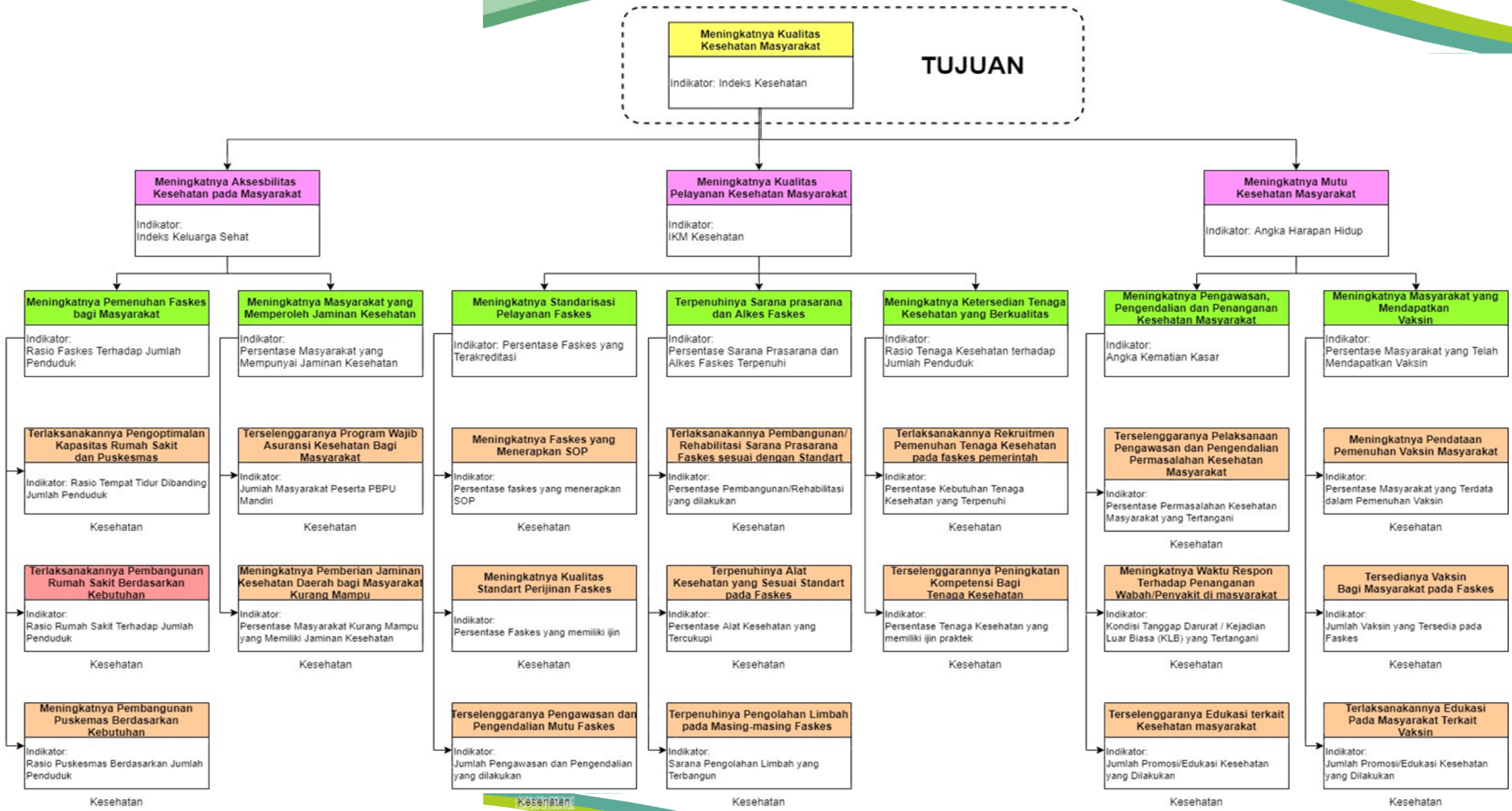
Tabel 5.1 Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang terkait Bidang Kesehatan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi			
2	Menurunkan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat 2. Menurunnya beban pengeluaran masyarakat 	Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	Peningkatan Jaminan Kesehatan
3	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ketenagakerjaan 	Pengoptimalan akses dan mutu Sumber Daya Manusia yang kolaboratif yang berfokus pada pemerataan mutu fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaminan kemudahan akses pada layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keahlian, penguatan dukungan lingkungan masyarakat dalam mendukung kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta peningkatan mutu pelatihan pengembangan keahlian ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penguatan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat 2. Pengoptimalan kapasitas fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan dalam memaksimalkan daya tampung dan pelayanan 3. Pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang kompeten pada seluruh faskes dan fasilitas pendidikan 4. Peningkatan ketercukupan sarana-prasarana serta media yang tepat guna penunjang peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan 5. Program Wajib Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan akuntabel			

Kerangka kerja kebijakan sebagai wujud pelaksanaan tujuan pembangunan daerah di bidang kesehatan digambarkan pada pohon kinerja sebagai berikut:



Gambar 5.1 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan



Tabel 5.2 Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan (TC. 26)

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Kesehatan pada masyarakat	Peningkatan pemenuhan fasilitas Kesehatan bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengoptimalan kapasitas rumah sakit dan puskesmas 2. Pelaksanaan pembangunan rumah sakit berdasarkan kebutuhan 3. Peningkatan pembangunan puskesmas berdasarkan kebutuhan
			Peningkatan masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program wajib asuransi kesehatan bagi masyarakat 2. Peningkatan pemberian jaminan Kesehatan daerah bagi masyarakat kurang mampu
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan pada masyarakat	Peningkatan standarisasi pelayanan fasilitas kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitas Kesehatan yang menerapkan Standard operasional pelayanan 2. Peningkatan kualitas standar perijinan fasilitas Kesehatan 3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu fasilitas pelayanan
			Peningkatan sarana prasarana dan alkes fasilitas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fasilitas Kesehatan sesuai standart 2. Pemenuhan alat Kesehatan yang standart pada fasilitas Kesehatan 3. Pemenuhan pengelolaan limbah pada masing masing fasilitas Kesehatan
			Peningkatan ketersediaan tenaga Kesehatan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rekrutmen pemenuhan tenaga Kesehatan bagi fasilitas Kesehatan pemerintah 2. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan
3	Meningkatnya mutu Kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu Kesehatan masyarakat	Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penanganan Kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian permasalahan Kesehatan masyarakat 2. Peningkatan waktu respon terhadap penanganan wabah penyakit di masyarakat 3. Penyelenggaraan edukasi terkait Kesehatan masyarakat

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan masyarakat yang mendapatkan vaksin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendataan pemenuhan vaksin masyarakat 2. Ketersediaan vaksin bagi masyarakat pada fasilitas Kesehatan 3. Pelaksanaan edukasi masyarakat terkait vaksin



5.1 STRATEGI KEGIATAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan isu yang berkembang maka Dinas Kesehatan mengembangkan beberapa strategi antara lain:

1. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dalam rangka menurunkan AKI dan AKB baik melalui anggaran APBN, Propinsi, Kabupaten, JAMPERSAL maupun melalui BOK. baik yang melalui program Kegiatan, Perbaikan dan Pengadaan Sarpras maupun kebijakan. Bentuk-bentuk dari kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : Semua pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yg kompeten dan di fasilitas kesehatan, Audit Maternal Neonatal (AMP), Pembelajaran hasil rekomendasi AMP, Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC dan PNC sesuai standar, FGD penurunan AKI dan AKB, penguatan koordinasi lintas program dan sektoral, konsultasi ahli bumil risti, klas ibu hamil dan klas balita, pembinaan bidan, pemberian FE 90 pada bumil, pemeriksaan HB dan Gol darah pada ibu hamil, PMT KEK pada bumil, Monitoring tim kabupaten ke Puskesmas (Tim PONEK RS ke Puskesmas PONED) dalam rangka penurunan AKI, Adanya kelas ibu hamil dan balita, Pendampingan KIA dalam rangka percepatan penurunan AKI tingkat kabupaten, Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi, Penemuan kasus risti dan tindak lanjutnya, ANC 6 kali, sistematika jejaring rujukan, pengembangan puskesmas PONED, Penguatan program P4K, pembinaan bidan, dan Pelayanan KB berkualitas, serta pelatihan peningkatan kompetensi dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya (APN, CTU, manajemen Asfiksia, manajemen BBLR, Puskesmas PONED). Komitmen Kabupaten Madiun dalam percepatan penurunan stunting telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 dengan menargetkan prevalensi stunting menjadi 9,5 % pada tahun 2024. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Madiun masih berada pada angka 17,6 % dimana naik sekitar 1,7 % dari tahun 2021 dengan prevalensi sebesar 15,9 %. Dalam rangka mengejar pencapaian target di tahun 2024 9,5 % diperlukan upaya konvergensi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa untuk melakukan intervensi

secara efektif dan tepat sasaran dalam rangka mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024.

Strategi lainnya yang ditempuh antara lain :

- a) Pemenuhan Antropometri di 877 Posyandu.
 - b) Pemberian PMT pada Baduta dengan status gizi pendek dan sangat pendek.
 - c) Pembinaan kader Posyandu
 - d) Pembinaan tenaga kesehatan Puskesmas
 - e) Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi pada petugas Puskesmas dan Kader Posyandu
 - f) Peningkatan penerapan SOP di Posyandu
2. Pelayanan kesehatan lingkungan sebagai upaya pengendalian faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit, gangguan dan hal yang merugikan kesehatan.
 3. Pelayanan kesehatan kerja dan olah raga sebagai upaya promotif dan preventif dalam mendukung program gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 4. Meningkatkan pembinaan pada Faskes
 5. Setelah sarana dan prasarana tersedia maka segera dilakukan pemenuhan kebutuhan lainnya seperti sumber daya manusia untuk ketenagaannya dan payung hukumnya. Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menpan no B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian dilingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang intinya mengingatkan kembali batas terakhir keberadaan non ASN di instansi pemerintah,
 6. Meningkatkan koordinasi lintas sector terkait untuk pemenuhan UHC (Dinsos, Dukcapil , BPJS)
 7. Memenuhi SDM Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit melalui pengusulan formasi PPPK ke BPSDM.
 8. Kebutuhan SDM Kesehatan harus tercukupi sesuai standar terutama pada fasilitas kesehatan dasar minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan dengan konsep revitalisasi fungsi Puskesmas Pada fasilitas rujukan dengan SDM Kesehatan yang memiliki banyak cabang kelurahan dalam spesialisasi dan sub spesialisasi untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan Kesehatan.

9. Meningkatkan fasilitas kefarmasian dan peralatan Kesehatan dan pangan olahan aman sesuai standar melalui upaya optimalisasi, rasionalitas penggunaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan obat/ BHP , optimalisasi pemeliharaan dan kalibrasi peralatan kesehatan serta peningkatan pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan pangan olahan yg beredar di masyarakat
10. Peningkatan skrining kesehatan usia >15 th.
11. Peningkatan promosi kesehatan terutama mengenai hipertensi dan komplikasinya dengan memberdayakan kader serta seluruh komponen masyarakat.
12. Peningkatan kompetensi SDM dalam tatalaksana hipertensi di fasyankes.
13. Memperkuat perbaikan factor risiko terjadinya PD3I dengan cakupan imunisasi rutin.
14. catch up imunisasi untuk anak-anak yang left-out ataupun drop-out sedini mungkin dengan melakukan sweeping dan Drop-Out Follow Up (DOFU) serta MULTIPLE INJECTION sehingga salah satu strategi efektif untuk akselerasi cakupan
15. Meningkatkan penyuluhan lewat media social (group WA) tentang protokol pelayanan imunisasi MULTIPLE INJECTION yang aman dan bermanfaat memberikan PERLINDUNGAN SEDINI MUNGKIN dari beberapa Penyakit sekaligus pada masyarakat
16. Melibatkan tokoh Masyarakat dan tokoh Agama dalam melakukan pendekatan bagi masyarakat yang menolak Imunisasi.
 - a. Peningkatan Peran kader desa dalam penemuan suspect di desa.
 - b. Meningkatkan IK (Investigasi Kontak) di tingkat RT
 - c. Memperkuat peran lintas sektor antara Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat Desa untuk menemukan sebanyak banyaknya.
 - d. Peningkatan kunjungan ke rumah kontak dengan penderita TB
 - e. Pelibatan Lintas OPD dalam penemuan angka kontak di desa. Dinas Pemeritah Desa, Dinas Dispenduk Capil, Dinas Sosial dan Dinas Kesbangpol

5.2 KEBIJAKAN PROGRAM

Beberapa kebijakan yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dinas Kesehatan adalah:

1. Di Kabupaten Madiun kebijakan yang dilaksanakan dalam upaya penurunan AKI dan AKB berupa pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 14 Tahun 2008 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA). Yang didalamnya mengatur pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak Balita seoptimal mungkin.
2. Peraturan Bupati Madiun Nomor: 93 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi.
3. Berbagai upaya sudah dibuat untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Madiun diantaranya melalui pengadaan bidan di setiap desa, pemberdayaan keluarga serta masyarakat dengan bentuk Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), dan juga penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam upaya penurunan Stunting adalah :

- Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
 - Peraturan Bupati Madiun Nomor: 93 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi.
 - Penggunaan 20 % anggaran Daerah untuk Anggaran Dana Desa yang didalamnya salah satunya untuk penurunan stunting.
4. Kebijakan Pelayanan kesehatan lingkungan melalui :
 - a) Peningkatan stbm 5 pilar, melalui Sosialisasi, pemecuan dan verifikasi di masyarakat/desa.
 - b) Pengawasan dan pembinaan kualitas air minum, melalui kegiatan inspeksi dan pemeriksaan kualitas sarana air minum masyarakat
 - c) Pengawasan dan pembinaan sanitasi perumahan,
 - d) Pengawasan dan pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan, melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan pengelola penjamah makanan untuk menuju sertifikat laik hygiene sanitasi dan stikerisasi TPM
 - e) Pengawasan dan pembinaan tempat fasilitas umum, melalui kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan dan sosialisasi.

- f) Pelaksanaan program Kabupaten Kota Sehat, melalui penguatan kelembagaan, penguatan program pembangunan daerah yang terdapat dalam indikator tatanan kabupaten kota sehat.
 - g) Pengawasan dan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes, inspeksi dan monitoring dan evaluasi pelaporan secara rutin.
 - h) Pelaksanakan strategi adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan (APIK)
5. Kebijakan Upaya Pelayanan kesehatan kerja dan olah raga:
 - a) Pembinaan program upaya kesehatan kerja di puskesmas
 - b) Pembinaan kesehatan olah raga masyarakat (anak sekolah, pekerja, haji, ibu hamil) dan pelaksanaan pengukuran kebugaran jasmani pada calon jamaah haji dan anak sekolah (SD kelas 4 - 6 berusia yang 10-12 tahun).
 6. Melakukan pembinaan pada faskes
 7. Mendukung akreditasi faskes
 8. Mengupayakan untuk dapatnya PSC menjadi UPT tersendiri agar bisa mengajukan usulan rencana kebutuhan ketenagaan di kementerian kesehatan, dan lebih mudah dalam penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran.
 9. Menyusun perbub tentang PSC.
 10. Mengajukan usulan pendanaan untuk mendukung Operasional PSC dan tercapainya UHC
 11. Mengupayakan pemetaan SDM Kesehatan berkoordinasi dengan SDK
 12. Pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas Kesehatan yang terstandarisasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran melalui prioritas kebutuhan.
 13. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan berdasarkan Sistem Informasi SDM Kesehatan (SI-SDMK) serta perencanaan kebutuhan SDM berbasis beban kerja (ABK) di fasilitas pelayanan Kesehatan melalui Renbut Nakes. Selanjutnya usulan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan melalui formasi PPPK ke BPSDM.
 14. Dalam Meningkatkan fasilitas kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sectoral, peningkatan pembinaan dan pengawasan yang diarahkan pada pemenuhan standard.
 15. Permenkes No. 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
 16. KMK HK 01.07/Menkes/4634/2021 tentang Hipertensi Dewasa
 17. Permenkes 4/ 2019 tentang juknis SPM

18. UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
19. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 : Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dg ketentuan utk mencegah terjadinya penyakit yg dapat dihindari melalui imunisasi Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak
20. UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 : “Pemerintah Daerah harus memprioritaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017. Penyelenggaraan *Imunisasi*.
22. Undang unfang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
23. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
24. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkolosis
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
26. Peraturan Menteri Kesehatannomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan tuberkolosis
27. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual

BAB VI.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KESEHATAN
SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, mengacu pada Kepmendagri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan mengacu pada rencana strategi Dinas Kesehatan yang telah disusun, sebagai berikut :

A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 4) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas
- 5) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- 6) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 7) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 8) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
- 11) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
- 12) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
- 13) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 14) Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 15) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- 16) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
 - 15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
 - 20) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 21) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

- 22) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 23) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- 24) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- 25) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 26) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 27) Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
- 28) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
- 29) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 30) Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ee.
- 31) Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- 32) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
- 33) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 34) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 35) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- 36) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 4) Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

B. Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

- 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 3. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 4. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 5. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 6. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
- D. Program Program Pemberdayaan Masyarakat
1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

E. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD



Tabel 6.1

Rencana Program. Kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun (TC 27)

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Menurunkan Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		nilai		73,58 **		74,18 **		74,78 **		74,78 **		
			nilai		74,19 *(moderat)		74,68 *(moderat)		74,93 *(moderat)		74,93 *(moderat)		
SASARAN DAERAH 2													
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		nilai		0,805 **		0,808 **		0,812 **		0,812 **		
TUJUAN OPD (DINAS KESEHATAN)													
Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan		nilai		0,805 **		0,808 **		0,812 **		0,812 **		
SASARAN OPD (DINAS KESEHATAN)						392,598,191,637		403,353,230,011		406,255,520,784		1,202,206,942,432	Dinkes dan RS
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat		nilai	0.218	0,22	130,866,063,879	0,22	134,451,076,670	0,22	135,418,506,928	0,22	400,735,647,477	Dinkes dan RS



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	IKM Kesehatan		nilai	71	71,54	130,866,063,879	71,7	134,451,076,670	71,86	135,418,506,928	71,86	400,735,647,477	Dinkes dan RS
	Angka Harapan Hidup		nilai	71,90	72	130,866,063,879	72	134,451,076,670	72	135,418,506,928	72	400,735,647,477	Dinkes dan RS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	nilai	70,04	80,01	239,312,402,692	83,00	246,085,846,512	86,00	250,321,702,277	86,00	735,719,951,480	Dinkes dan RS
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Hasil rekap nilai Survey Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	nilai	75	77	13,295,133,483	88	13,671,435,917	90	13,906,761,238	90	40,873,330,638	Dinkes dan RS
	Nilai Pengawasan Kearsipan	Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan	nilai	40,94	60,94	13,295,133,483	66,34	13,671,435,917	71,74	13,906,761,238	44	40,873,330,638	Dinkes dan RS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK)	Jumlah ASN yg terpenuhi gaji dan tunjangan dibagi jumlah ASN	Persen	100%	100%	109,575,710,569		114,111,158,719		114,200,444,161		337,887,313,449	Dinkes dan RS
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	1333	1429	109,283,682,371	1528	113,810,408,934	1640	113,909,259,552	1071	337,003,350,857	Dinkes dan RS
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	292,028,198	12	300,749,784	12	291,184,609	12	883,962,592	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terdanaai	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terdanaai dibagi jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah x 100%	persen	100%	100%	1,212,367,476	100%	1,248,575,511	100%	1,208,865,281	100%	3,669,808,268	Dinkes
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	2	15,280,135	2	15,736,484	2	15,235,994	2	46,252,613	Dinkes
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	60,045,223	1	61,838,508	1	59,871,769	1	181,755,500	Dinkes
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	4	272,525,009	4	280,664,122	4	271,737,760	4	824,926,891	Dinkes
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4	74,657,499	4	76,887,187	4	74,441,834	4	225,986,520	Dinkes
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket	4	4	789,859,610	4	813,449,211	4	787,577,923	4	2,390,886,744	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdani	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didanai dibagi jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x100%	%	100.00%	100.00%	1,637,704,043	100.00%	1,686,614,994	100.00%	1,632,973,169	100.00%	4,957,292,206	Dinkes
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	paket	1	1	40,515,570	1	41,725,591	1	40,398,533	1	122,639,694	Dinkes
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	paket	12	12	712,256,386	12	733,528,323	12	710,198,874	12	2,155,983,583	Dinkes
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	paket	4	4	884,932,087	4	911,361,081	4	882,375,762	4	2,678,668,930	Dinkes
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x100%	%	100.00%	100.00%	714,870,881	100.00%	736,220,902	100.00%	712,805,817	100.00%	2,163,897,601	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	17	20	115,266,471	20	118,708,969	20	114,933,498	20	348,908,938	Dinkes
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	378,102,656	2	389,394,905	2	377,010,422	2	1,144,507,983	Dinkes
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	6	221,501,754	6	228,117,029	6	220,861,897	6	670,480,680	Dinkes
Peningkatan Pelayanan BLUD	Akreditasi Rumah Sakit (Rumah Sakit Caruban)	Nilai Akreditasi RS Caruban	Terakreditasi	Terakreditasi	terakreditasi	100,000,000	terakreditasi	100,000,000	terakreditasi	100,000,000	terakreditasi	300,000,000	RS Caruban
	Akreditasi Rumah Sakit (Rumah Sakit Dolopo)	Nilai Akreditasi RS Dolopo	Terakreditasi	Terakreditasi	terakreditasi	100,000,000	terakreditasi	100,000,000	terakreditasi	100,000,000	terakreditasi	300,000,000	RS Dolopo
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sesuai standar (RSUD Caruban)	Capaian Nilai SPM RS Caruban dibagi Target nilai SPM RS Caruban x 100%	Persen	90%	90 %	97,662,016,688	91 %	98,546,148,220	92 %	100,280,136,323	92 %	296,488,301,231	RS Caruban



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sesuai standar (RSUD Dolopo)	Capaian Nilai SPM RS Dolopo dibagi Target nilai SPM RS Dolopo x 100%	Persen	92.22 %	94.44 %	54,900,000,000	95.56 %	56,900,000,000	96.67 %	59,900,000,000	96.67 %	171,700,000,000	RS Dolopo
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	152,862,016,688	2 Unit Kerja	155,766,148,220	2 Unit Kerja	160,530,136,323	2 Unit Kerja	469,158,301,231	Rumah Sakit Caruban dan Dolopo
PROGRAM						122,022,065,739		125,099,824,754		123,437,233,586		370,559,124,079	#REF!
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	Jumlah kematian bayi dalam 1 tahun/jumlah lahir hidup dalam 1 tahun x 1000	per 1000 lahir hidup	6,18 per 1000 lahir hidup	5,57 per 1000 lahir hidup	16,087,956,515	5,29 per 1000 lahir hidup	16,572,389,924	5,02 per 1000 lahir hidup	16,049,543,620	5,02 per 1000 lahir hidup	48,709,890,059	Dinkes
	Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu dalam 1 tahun/jumlah lahir hidup dalam 1 tahun x 100.000	per 100.000 lahir hidup	77,19 per 100.000 lahir hidup	73,00 per 100.000 lahir hidup	16,087,956,515	70,00 per 100.000 lahir hidup	16,572,389,924	66,00 per 100.000 lahir hidup	16,049,543,620	66,00 per 100.000 lahir hidup	48,709,890,059	Dinkes
	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada puskesmas (9 tenaga kesehatan)	jumlah puskesmas yang terpenuhi tenaga kesehatan essensial (9 jenis) / Jumlah puskesmas	Persen	76,92 %	84,00 %	16,087,956,515	92,00 %	16,572,389,924	100%	16,049,543,620	10%	48,709,890,059	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prevalensi Balita Stunting	Jumlah Balita pendek / Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan x 100	Persen	17,6 %	14%	16,087,956,515	12%	16,572,389,924	10%	16,049,543,620	69.00 %	48,709,890,059	Dinkes
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	(Σ sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang memenuhi standar) x 100 % Jumlah sarana, prasarana dan peralatan puskesmas	Persen	57%	61,00 persen	16,087,956,515	65,00%	16,572,389,924	69,00%	16,049,543,620	2.00 %	48,709,890,059	Dinkes
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Caruban)	(Σ sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang memenuhi standar) x 100 % Jumlah sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit	Persen	65.17 %	66 %	19,172,157,079	67 %	19,474,427,932	68 %	19,913,196,488	68 %	58,559,781,499	RS Caruban
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Dolopo)	(Σ sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang memenuhi standar) x 100 % Jumlah sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit	Persen	64%	65%	22,410,126,086	66%	22,763,447,201	67%	23,276,318,998	67%	68,449,892,285	RS Dolopo



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan	(Σ sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terealisasi) x 100 %) Jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang direncanakan	%	100.00%	100.00%	34,860,279,250	100.00%	35,901,401,077	100.00%	34,759,577,533	100.00%	105,521,257,860	Dinkes
	persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit (rsud caruban)	(Σ sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terealisasi) x 100 %) Jumlah sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit yang direncanakan	%	100.00%	100%	19,172,157,079	100%	19,474,427,932	100%	19,913,196,488	100.00%	58,559,781,499	Rumah Sakit Caruban
	persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit (rsud dolopo)	(Σ sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terealisasi) x 100 %) Jumlah sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit yang direncanakan	%	100.00%	100%	22,410,126,086	100%	22,763,447,201	100%	23,276,318,998	100.00%	68,449,892,285	Rumah Sakit Dolopo
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	unit	1	1	3,338,187,347	1	3,437,884,187	1	3,328,544,245	3	10,104,615,779	Dinkes
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1	1	950,651,307	1	979,043,042	1	947,905,138	3	2,877,599,486	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit Kerja	2 Unit	2 Unit	17,677,482,279	2 unit	13,826,889,552	2 unit	20,060,147,488	6 unit	51,564,519,319	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	10 Unit	2 Unit	2,500,000,000	2 Unit	2,000,000,000	2 unit	2,500,000,000	6 unit	7,000,000,000	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5 unit	3 Unit	3,000,000,000	4 Unit	3,000,000,000	3 Unit	4,000,000,000	10 Unit	10,000,000,000	Rumah Sakit Dolopo dan Caruban



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	3	5	12,433,660,537	5	12,804,998,795	5	12,397,743,126	15 Unit	37,636,402,458	Dinkes
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	2	2	4,234,782,258	2	4,361,256,410	2	4,222,549,141	6 unit	12,818,587,808	Dinkes
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	1	989,518,267	1	1,019,070,786	1	986,659,822	3 Unit	2,995,248,875	Dinkes
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	1	1	1,010,067,013	1	1,040,233,232	1	1,007,149,209	3 Unit	3,057,449,454	Dinkes
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	15	6	3,541,518,267	6	3,219,070,786	4	2,536,659,822	16	9,297,248,875	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	146	95	19,603,287,384	86	25,079,455,578	60	18,818,440,631	241	63,501,183,593	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	103	122	2,822,005,533	127	2,903,299,758	132	2,814,142,411	381	8,539,447,703	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Caruban
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	30	32	3,806,660,864	32	3,917,362,373	32	3,795,953,344	96	11,519,976,581	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Caruban
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	312	234	118,831,413	230	122,380,380	230	118,488,142	694	359,699,936	Dinkes
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit alat	100	100	415,909,947	100	428,331,331	100	414,708,498	300	1,258,949,775	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						76,442,562,415								
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	Nilai Rata Rata Cakupan SPM Bidang Kesehatan	persen	81.7	100%	44,902,651,836	100%	46,263,482,506	100%	44,813,244,315	100%	135,979,378,657	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	Orang	8,197	8,971	96,535,432	8,881	99,418,517	8,797	96,256,567	26,649	292,210,516	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7,682	8,563	68,202,933	8,569	70,239,852	8,488	68,005,914	25,620	206,448,699	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7,730	8,156	61,815,935	8,075	63,662,102	7,999	61,637,366	24,230	187,115,403	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30,458	41,926	33,097,163	41,408	34,085,628	40,994	33,001,555	124,328	100,184,346	Dinkes	



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	73,626	74,400	197,329,882	75,000	203,223,250	75,245	196,759,851	224,645	597,312,983	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	366,309	421,574	99,239,476	421,574	102,203,320	421,574	98,952,801	1,264,722	300,395,596	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	102,406	102,406	29,378,783	102,406	30,256,197	102,406	29,293,915	307,218	88,928,895	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	59,249	239,829	59,415,707	239,829	61,190,190	239,829	59,244,071	719,487	179,849,968	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17,296	17,381	906,612,385	17,381	933,688,873	17,381	903,993,432	52,143	2,744,294,690	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	980	1,308	36,427,770	1,310	37,515,706	1,312	36,322,541	3,930	110,266,016	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	Orang	5,977	6,575	59,415,707	7,232	61,190,190	7,250	59,244,071	21,057	179,849,968	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	913	1,005	68,919,843	1,106	70,978,173	1,216	68,720,753	3,327	208,618,769	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9090	9,090	558,507,643	9,090	575,187,787	9,090	556,894,268	27,270	1,690,589,698	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	220	220	118,831,413	220	128,208,017	220	130,041,408	660	377,080,839	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kegiatan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Kegiatan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	118,831,413	7 Dokumen	116,552,743	7 Dokumen	107,472,238	21 Dokumen	342,856,394	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	11,427,451,002	2 dokumen	11,768,738,247	2 dokumen	11,394,440,252	6 dokumen	34,590,629,501	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	67,186,568	2 dokumen	69,193,133	2 dokumen	66,992,485	6 dokumen	203,372,186	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	232,395,624	5 dokumen	239,336,250	5 dokumen	231,724,298	15 dokumen	703,456,172	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	347,274,151	2 dokumen	357,645,689	2 dokumen	346,270,972	6 dokumen	1,051,190,812	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	75,004,772	4 Dokumen	77,244,832	4 Dokumen	74,788,104	12 Dokumen	227,037,708	Dinkes
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	32,975,717	13 Dokumen	33,960,556	13 Dokumen	32,880,459	39 Dokumen	99,816,732	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		4	58,637,361	4	60,388,599	4	58,467,974	12	177,493,934	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	12	12	19,545,094	12	20,128,820	12	19,488,633	12	59,162,546	Dinkes
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kegiatan	1	1	1,594,553,518	1	1,642,175,754	1	1,589,947,294	3	4,826,676,566	Dinkes
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12	12	26,071,540,514	12	26,850,181,721	12	25,996,227,035	36	78,917,949,270	Dinkes
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	48	48	522,323,477	48	563,538,341	48	571,597,008	144	1,657,458,826	Dinkes
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Potensial KLB ke Lboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Dokumen Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Potensial KLB ke Lboratorium Rujukan/Nasional	Paket	34	34	969,865,361	34	998,830,936	34	967,063,688	102	2,935,759,985	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	unit	7	10	852,505,778	10	877,966,342	10	850,043,124	30	2,580,515,245	Dinkes
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pusk	26	26	118,831,413	26	116,552,743	26	107,472,238	78	342,856,394	Dinkes
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diterbitkan ijinnya		persen	100	100	676,851,488	100	697,066,038	100	674,896,251	100	2,048,813,778	Dinkes
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Pusk	26	26	236,953,995	26	244,030,759	26	236,269,501	78	717,254,255	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	439,897,493	8 Dokumen	453,035,279	8 Dokumen	438,626,752	24 Dokumen	1,331,559,524	Dinkes
						3,187,448,035		3,282,642,962		3,178,240,378		9,648,331,374	Dinkes
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan (Medis) terhadap jumlah penduduk	jumlah tenaga medis dibanding jumlah penduduk	nilai	0.31 : 1.000	0.5 : 1.000	1,593,724,018	0.7 : 1.000	1,641,321,481	0.9 : 1.000	1,589,120,189	01:01.0	4,824,165,687	Dinkes
	Rasio tenaga kesehatan (paramedis) terhadap jumlah penduduk	jumlah tenaga paramedis dibanding jumlah penduduk	nilai	1.4 : 1.000	02:01.0	1,593,724,018	2.5 : 1.000	1,641,321,481	03:01.0	1,589,120,189	03:01.0	4,824,165,687	Dinkes
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pengajuan Rekomendasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang dikeluarkan		persen	100	100	43,791,752	100	45,099,618	100	43,665,250	100	132,556,620	Dinkes
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	90	90	43,791,752	90	45,099,618	90	43,665,250	270	132,556,620	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memenuhi standar SDM sesuai Permenkes 43 Tahun 2019		persen	76.9	85	1,301,249,229	92	1,340,111,769	100	1,297,490,279	100	3,938,851,278	Dinkes
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	6	6	11,914,038	6	12,269,857	6	11,879,621	18	36,063,516	Dinkes
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah perawat ponkesdes dan dokter puskesmas rawat inap standar yang mendapat honor dari Provinsi	Jumlah perawat ponkesdes dan dokter puskesmas rawat inap standar yang mendapat honor dari Provinsi	Org	40	40	1,156,501,576	40	1,191,041,146	40	1,153,160,762	120	3,500,703,484	Dinkes
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	4	4	132,833,616	4	136,800,767	4	132,449,896	12	402,084,279	Dinkes
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nakes yang lulus uji kompetensi kenaikan jenjang	Jumlah Nakes yang lulus uji kompetensi kenaikan jenjang dibagi dengan jumlah nakes yang ikut uji kompetensi x 100%	persen	95	100	1,842,407,053	100	1,897,431,575	100	1,837,084,848	100	5,576,923,476	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	90	90	1,842,407,053	90	1,897,431,575	90	1,837,084,848	270	5,576,923,476	Dinkes
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standard	Jumlah sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standard / sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman x 100%	%	100	100	726,200,597	100	747,888,986	100	724,102,804	100	2,198,192,388	Dinkes
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diperiksa	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diperiksa dibagi dengan jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) x 100%	Persen	73	73	70,024,296	74	72,115,610	75	69,822,014	75	211,961,920	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	73	72	70,024,296	73	72,115,610	74	69,822,014	219	211,961,920	Dinkes
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi komitmen dalam kurun waktu 3- 6 bulan setelah nomor PIRT diterbitkan	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi komitmen dalam kurun waktu 3- 6 bulan setelah nomor PIRT diterbitkan / Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang diterbitkan nomor PIRT nya	%	78%	78	409,486,296	80	421,715,835	81	408,303,403	81	1,239,505,533	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	360	260	409,486,296	273	421,715,835	286	408,303,403	819	1,239,505,533	Dinkes
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase TPM Jasa Boga, Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memperoleh sertifikat laik higiene sanitasi	Jumlah TPM Jasa Boga, Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memperoleh sertifikat laik higiene sanitasi / Jumlah TPM Jasa Boga, Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdaftar	%	10	12	18,654,868	12.5	19,212,006	13	18,600,980	13	56,467,855	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat, Jumlah DAM yang memenuhi syarat	Jumlah TPM yang memenuhi syarat, Jumlah DAM yang memenuhi syarat	Dokumen	2	2	18,654,868	2	19,212,006	2	18,600,980	6	56,467,855	Dinkes
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Prosentase Tempat pengolahan pangan siap saji yang mendapat stiker pembinaan	Jumlah Tempat pengolahan pangan siap saji yang mendapat stiker pembinaan / jumlah Tempat pengolahan pangan siap saji yang terdaftar	%	4.5	5	21,248,245	6	21,882,836	7.5	21,186,865	7.5	64,317,946	Dinkes
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah tempat pengelolaan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan stiker pembinaan	Jumlah tempat pengelolaan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan stiker pembinaan	Dokumen	1	1	21,248,245	1	21,882,836	1	21,186,865	3	64,317,946	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat / Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar x 100%	%	65	65	206,786,893	70	212,962,699	75	206,189,542	210	625,939,134	Dinkes
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	152	152	206,786,893	152	212,962,699	152	206,189,542	456	625,939,134	Dinkes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentasi UKBM yang di lakukan pembinaan	Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan/ Jumlah UKBM yang terdata x 100%	%	100	100	759,807,608	100	794,154,963	100	780,719,264	100	2,334,681,835	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten	jumlah kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor yang dilakukan / jumlah kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor yang direncanakan	persen	100	100	522,144,781	100	537,738,928	100	520,636,449	100	1,580,520,158	Dinkes
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	3	522,144,781	3	537,738,928	3	520,636,449	9	1,580,520,158	Dinkes
Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota	Prosentasi UKBM yang dibina	Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan/ Jumlah UKBM yang terdata x 100%	persentase	100	100	237,662,827	100	256,416,035	100	260,082,816	100	754,161,677	Dinkes
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	3	237,662,827	3	256,416,035	3	260,082,816	9	754,161,677	Dinkes



TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				TOTAL		392,598,191,637		403,353,230,011		406,255,520,784		384,740,329,676	



BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (TC 28)

No	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai		73,58 **	74,18 **	74,78 **	74,78 **
		nilai		74,19 *(moderat)	74,68 *(moderat)	74,93 *(moderat)	74,93 *(moderat)
2	Indeks Kesehatan	nilai		0,805 **	0,808 **	0,812 **	0,812 **
3	Indeks Kesehatan	nilai		0,805 **	0,808 **	0,812 **	0,812 **
4	Indeks Keluarga Sehat	nilai	0.218	0,22	0,22	0,22	0,22
5	IKM Kesehatan	nilai	71	71,54	71,7	71,86	71,86
6	Angka Harapan Hidup	nilai	71,90	72	72	72	72
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	70.04	80,01	83,00	86,00	86,00
8	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	nilai	75	77	88	90	90

No	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)
9	Nilai Pengawasan Kearsipan	nilai	40,94	60,94	66,34	71,74	44
	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK)	Persen	100%	100%			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	1333	1429	1528	1640	1071
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	12	12	12
	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terdanai	persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	2	2	2	2
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1	1	1
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	4	4	4	4
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4	4	4	4
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket	4	4	4	4	4
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdanai	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	paket	1	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	4	4
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	17	20	20	20	20

No	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	2	2	2
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	6	6	6	6
	Akreditasi Rumah Sakit (Rumah Sakit Caruban)	Terakreditasi	Terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi
	Akreditasi Rumah Sakit (Rumah Sakit Dolopo)	Terakreditasi	Terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sesuai standar (RSUD Caruban)	Persen	90%	90 %	91 %	92 %	92 %
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit sesuai standar (RSUD Dolopo)	Persen	92.22%	94.44 %	95.56 %	96.67 %	96.67 %
	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja
	Angka Kematian Bayi	per 1000 lahir hidup	6,18 per 1000 lahir hidup	5,57 per 1000 lahir hidup	5,29 per 1000 lahir hidup	5,02 per 1000 lahir hidup	5,02 per 1000 lahir hidup
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 lahir hidup	77,19 per 100.000 lahir hidup	73,00 per 100.000 lahir hidup	70,00 per 100.000 lahir hidup	66,00 per 100.000 lahir hidup	66,00 per 100.000 lahir hidup
	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada puskesmas (9 tenaga kesehatan)	Persen	76,92 %	84,00 %	92,00 %	100%	10%
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	17,6%	14%	12%	10%	69.00%
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	Persen	57%	61,00 persen	65,00%	69,00%	2.00%
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Caruban)	Persen	65.17 %	66 %	67 %	68 %	68 %

No	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Dolopo)	Persen	64%	65%	66%	67%	67%
	persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit (rsud caruban)	%	100.00%	100 %	100 %	100 %	100.00%
	persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit (rsud dolopo)	%	100.00%	100 %	100 %	100 %	100.00%
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	unit	1	1	1	1	3
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1	1	1	1	3
	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit Kerja	2 Unit	2 Unit	2 unit	2 unit	6 unit
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 unit	6 unit
	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5 unit	3 Unit	4 Unit	3 Unit	10 Unit
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	3	5	5	5	15 Unit
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	2	2	2	2	6 unit
	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	1	1	1	3 Unit
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	1	1	1	1	3 Unit
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	15	6	6	4	16

No	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	146	95	86	60	241
	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	103	122	127	132	381
	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	30	32	32	32	96
	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	312	234	230	230	694
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit alat	100	100	100	100	300
	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	persen	81.7	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8,197	8,971	8,881	8,797	26,649
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7,682	8,563	8,569	8,488	25,620
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7,730	8,156	8,075	7,999	24,230
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30,458	41,926	41,408	40,994	124,328
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	73,626	74,400	75,000	75,245	224,645
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	366,309	421,574	421,574	421,574	1,264,722
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	102,406	102,406	102,406	102,406	307,218

No	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	59,249	239,829	239,829	239,829	719,487
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17,296	17,381	17,381	17,381	52,143
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	980	1,308	1,310	1,312	3,930
	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	Orang	5,977	6,575	7,232	7,250	21,057
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	913	1,005	1,106	1,216	3,327
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9090	9,090	9,090	9,090	27,270
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	220	220	220	220	660
	Jumlah Kegiatan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	21 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6 dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6 dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	15 dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6 dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	39 Dokumen

No	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		4	4	4	12
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	12	12	12	12	12
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kegiatan	1	1	1	1	3
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12	12	12	12	36
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	48	48	48	48	144
	Jumlah Dokumen Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Potensial KLB ke Lboratorium Rujukan/Nasional	Paket	34	34	34	34	102
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	unit	7	10	10	10	30
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pusk	26	26	26	26	78
	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diterbitkan ijinnya	persen	100	100	100	100	100
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Pusk	26	26	26	26	78
	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	24 Dokumen
	Rasio tenaga kesehatan (Medis) terhadap jumlah penduduk	nilai	0.31 : 1.000	0.5 : 1.000	0.7 : 1.000	0.9 : 1.000	01:01.0

No	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)
	Rasio tenaga kesehatan (paramedis) terhadap jumlah penduduk	nilai	1.4 : 1.000	02:01.0	2.5 : 1.000	03:01.0	03:01.0
	Persentase Pengajuan Rekomendasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang dikeluarkan	persen	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	90	90	90	90	270
	Persentase Puskesmas memenuhi standar SDM sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	persen	76.9	85	92	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	6	6	6	6	18
	Jumlah perawat ponkesdes dan dokter puskesmas rawat inap standar yang mendapat honor dari Provinsi	Org	40	40	40	40	120
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	4	4	4	4	12
	Persentase Nakes yang lulus uji kompetensi kenaikan jenjang	persen	95	100	100	100	100
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	90	90	90	90	270
	Persentase sarana farmasi , alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standard	%	100	100	100	100	100
	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diperiksa	Persen	73	73	74	75	75
	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	73	72	73	74	219
	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi komitmen dalam kurun waktu 3- 6 bulan setelah nomor PIRT diterbitkan	%	78%	78	80	81	81

No	INDIKATOR	Satuan	Capaian Awal Tahun (2022)	Target Kinerja Program			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	360	260	273	286	819
	Prosentase TPM Jasa Boga, Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memperoleh sertifikat laik higiene sanitasi	%	10	12	12.5	13	13
	Jumlah TPM yang memenuhi syarat, Jumlah DAM yang memenuhi syarat	Dokumen	2	2	2	2	6
	Prosentase Tempat pengolahan pangan siap saji yang mendapat stiker pembinaan	%	4.5	5	6	7.5	7.5
	Jumlah tempat pengelolaan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan stiker pembinaan	Dokumen	1	1	1	1	3
	Persentase Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	65	65	70	75	210
	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	152	152	152	152	456
	Persentasi UKBM yang di lakukan pembinaan	%	100	100	100	100	100
	Prosentase kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten	persen	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	3	3	3	9
	Prosentasi UKBM yang dibina	persentase	100	100	100	100	100
	jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	3	3	3	9

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan yang dilakukan pada dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Periode 2018- 2023 pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan pelaksanaan pembangunan daerah terhadap perubahan yang terjadi, yaitu wabah Covid-19 dan perubahan kebijakan nasional. Untuk dapat menyelaraskan pembangunan daerah Kabupaten Madiun dengan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 harus dilakukan perubahan.

Perubahan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Periode 2018- 2023 mengharuskan dilakukannya perubahan Renstra tiap SKPD di Kabupaten Madiun. Perubahan yang dilakukan ini juga bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian dari visi dan misi Bupati Madiun sehingga membawa dampak yang positif bagi masyarakat Kabupaten Madiun.

Perubahan Renstra pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2023 merupakan perubahan dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan pada Dinas Kesehatan serta berpedoman pada Perubahan RPJMD perubahan Tahun 2021 - 2023. Perubahan Renstra pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2023 akan menjadi pedoman pada Dinas Kesehatan dalam menyusun Renja pada Dinas Kesehatan Tahun 2021, 2022, dan 2023.